

Membangun Dialog Lintas Identitas oleh Pemuda sebagai Lawan Positif Buzzer dalam Upaya Merajut Persatuan untuk Melawan Polarisasi yang Diciptakan Buzzer

Sejak Sumpah Pemuda dideklarasikan pada tahun 1928, pemuda Indonesia memegang tugas penting dalam sejarah sebagai garda terdepan persatuan bangsa, yang dibangun di atas kesadaran bersama tentang satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa di tengah keragaman golongan. Saat ini, semangat persatuan tersebut kembali diuji, bukan oleh ancaman fisik, melainkan oleh ancaman internal yang lebih halus seperti polarisasi sosial dan politik di ruang digital. Fenomena ini diperparah dengan hadirnya *buzzer*, yaitu aktor-aktor yang beroperasi secara sistematis untuk menyebarkan disinformasi, memproduksi narasi kebencian, dan memecah belah publik demi agenda tertentu. Operasi buzzer telah merusak cara berdiskusi yang sehat, memperkuat prasangka terhadap hal yang dibahas dan menutup pandangan berbeda, dan menjadikan perbedaan identitas sebagai senjata perselisihan sehingga mengikis rasa saling percaya. Penelitian terkini menunjukkan bahwa peningkatan polarisasi ini telah mencapai titik kritis, mengancam ketahanan demokrasi dan persatuan pada saat ini di Indonesia.

Kondisi tersebut secara langsung menyebabkan kehancuran ruang dialog dan melemahkan fungsi akal sehat dalam pengambilan keputusan publik. Ketika masyarakat semakin terpecah ke dalam kubu-kubu ideologis yang saling bermusuhan, komunikasi yang bersifat positif dan lintas-identitas menjadi mustahil. Misalnya, saat terjadi perbedaan pandangan di media sosial tentang isu politik, banyak pengguna langsung menyerang pribadi lawannya, bukan berdiskusi secara sehat. Akibatnya, kepercayaan antarwarga dan terhadap institusi demokratis perlahan luntur, digantikan oleh kecurigaan, emosi, dan fanatisme golongan. Persatuan, yang seharusnya menjadi kekayaan bangsa, justru berubah menjadi sumber ketegangan yang berpotensi meledak kapan saja, menuntut adanya campur tangan dari aktor yang memiliki idealisme tertinggi.

Isu buzzer bukan lagi sekadar persoalan akun anonim, melainkan cerminan dari fenomena perang narasi yang terorganisir di ruang publik digital. Dalam

konteks ini, buzzer dapat didefinisikan sebagai aktor yang melakukan penyebarluasan isu, penyebaran disinformasi, dan penyesatan opini secara terstruktur, yang didorong oleh motivasi politik atau ekonomi.

Pada mulanya, buzzer merupakan istilah yang diambil dari dunia pemasaran untuk mendeskripsikan *buzz marketing*, yaitu sebuah teknik yang memanfaatkan pergerakan informasi dari mulut ke mulut sebagai cara efektif untuk mempromosikan barang atau jasa (Mustika, 2019). Popularitas istilah buzzer meningkat seiring pesatnya perkembangan teknologi media sosial. Dalam konteks ini, buzzer berevolusi tidak hanya sekadar mengunggah konten, tetapi juga menjalankan kampanye terstruktur kepada para *follower*. Kekuatan utama buzzer terletak pada kemampuannya yang masif dalam menjangkau dan mendistribusikan konten kepada beragam pengguna media sosial, sehingga memiliki pengaruh yang signifikan (Saraswati, 2018). Benar bila dikatakan buzzer adalah bentuk demokrasi saat menyampaikan pendapat dalam penggunaan media teknologi. Namun di sisi lain, operasi buzzer cenderung memberikan dampak negatif karena teknik kampanye yang digunakan banyak didominasi oleh penyebaran hoaks, fitnah, ujaran kebencian (Rudi, 2023).

Dalam konteks penelitian, buzzer politik didefinisikan sebagai akun media sosial, baik yang dikelola oleh perorangan maupun perusahaan yang memiliki banyak pengikut dan secara aktif terlibat dalam kampanye politik. Buzzer politik di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi buzzer relawan (perorangan) dan buzzer profesional (perusahaan). Buzzer relawan beroperasi secara mandiri, tanpa imbalan khusus, dan memperkuat pesan politik berdasarkan inisiatif personal. Sebaliknya, buzzer profesional bekerja secara terstruktur, sering kali direkrut oleh elit politik. Buzzer profesional memiliki strategi untuk memastikan ulasan atau konten mereka menjadi viral dan trending, yang pada akhirnya digunakan untuk memperkuat pesan dan menyerang citra lawan secara sistematis. Kelompok yang terorganisir inilah yang menjadi kekhawatiran utama publik dan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Akun-akun tersebut menjalankan fungsinya dengan menyebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian secara masif (Sugiono, 2020). Selain itu, tingginya frekuensi konten negatif yang diproduksi oleh buzzer

memicu keresahan dan spekulasi di tengah masyarakat. Salah satu asumsi terkuat adalah bahwa para buzzer tersebut beroperasi berdasarkan perintah (dibayar) dari pihak-pihak tertentu (Felicia & Loisa, 2019).

Berdasarkan data dalam penelitian Bradshaw dan Howard (2019) analisis mendalam mengenai penggunaan buzzer dalam ranah politik menunjukkan bahwa fenomena ini bersifat global dan terstruktur. Penelitian yang dilakukan oleh Oxford Internet Institute (OII) dari Oxford University terhadap 70 negara, termasuk Indonesia, menemukan bahwa penggunaan buzzer hampir dilakukan di seluruh belahan dunia. Riset tersebut mencatat bahwa sebanyak 89% dari negara subjek penelitian memanfaatkan buzzer untuk tujuan menyerang lawan politik. Menurut Siregar & Qurniawati (2022) secara spesifik di Indonesia, buzzer digunakan oleh politisi dan partai politik dalam upaya membangun opini dan dukungan publik terhadap calon pemimpin. Pasukan siber Indonesia cenderung beroperasi menggunakan kombinasi akun bot dan akun yang dikendalikan manusia dalam jumlah besar. Strategi utamanya adalah menciptakan konten yang bersifat *disinformasi*, serta memperkuat propaganda. Banyaknya pesan yang diproduksi oleh jaringan buzzer ini memastikan topik pembicaraannya dapat menjadi trending topic di media sosial, yang secara efektif memanipulasi publik.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan, bisa kita ketahui bahwa logika buzzer tidak berakar pada perbedaan ideologi yang sehat, melainkan pada mengacaukan komunikasi secara sengaja. Buzzer beroperasi dengan mekanisme yang bertujuan untuk membajak perhatian publik dan memanipulasi perasaan, menjadikannya lawan alami dari prinsip musyawarah yang dibangun oleh bangsa ini. Logika mereka memanfaatkan karakteristik media sosial yang mendorong konten berbasis emosi (konten yang memicu kemarahan, ketakutan, atau euforia) alih-alih konten berbasis rasionalitas.

Kerusakan utama yang ditimbulkan oleh buzzer adalah polarisasi sentimental. Berbeda dengan polarisasi ideologis yang hanya memisahkan pandangan politik, polarisasi sentimental memisahkan masyarakat berdasarkan perasaan emosional yakni kebencian dan ketidakpercayaan terhadap kelompok lawan politik atau identitas yang berbeda. Buzzer mencapai hal ini dengan

menggunakan taktik seperti *ad hominem*, penyebaran fitnah, dan pemaksaan *framing* yang bertujuan mendemonisasi kelompok lawan.

Fenomena ini diperkuat oleh situasi pengasingan informasi yang disengaja. Dalam kondisi ini, seseorang hanya menerima informasi yang membenarkan keyakinannya, sehingga ia akan semakin mengukuhkan pandangan kelompoknya (*in-group views*) dan secara otomatis menolak atau memusuhi perspektif dari luar. Pemisahan informasi ini secara langsung memutus dialog lintas identitas karena tidak ada lagi kesamaan pemahaman. Hasilnya, keragaman yang seharusnya menjadi kekuatan bangsa (seperti yang diikrarkan Sumpah Pemuda) justru diubah menjadi garis patahan yang rentan memecah belah. Oleh karena itu, langkah pertama dalam merajut persatuan adalah menguraikan dan mendiagnosis secara tepat bagaimana logika destruktif ini beroperasi di ruang digital.

Jika logika buzzer adalah memanipulasi kebenaran untuk memicu emosi, maka respons pemuda sebagai lawan positif dari buzzer harus dimulai dari pertahanan di level kognitif, yakni melalui penguatan literasi kritis digital. Sebagai generasi yang tumbuh di era digital, pemuda sebenarnya paling tahu bagaimana informasi bisa dengan mudah memecah belah. Strategi ini mengubah peran pemuda dari sekadar konsumen pasif yang mudah terpancing emosi menjadi seseorang yang aktif memverifikasi informasi. Pertahanan berpikir kritis berarti membangun tembok pertahanan mental terhadap disinformasi. Pemuda didorong untuk selalu mempertanyakan: siapa pembuat konten, apa motivasi di baliknya, dan apa sumber data yang digunakan. Mereka harus menguasai teknik *fact-checking* mendasar, mampu mengidentifikasi *deepfake* atau *framing* yang berlebihan, dan memiliki kecenderungan menunda untuk menghakimi hingga validasi data tercapai.

Peran dalam mengurus data ini sangat vital bagi terwujudnya dialog lintas identitas. Dialog yang sehat mensyaratkan adanya kesamaan pemahaman pada realitas, tidak mungkin terjadi musyawarah ketika setiap pihak berpegangan pada fakta yang berbeda dan dibenturkan oleh narasi emosional. Dengan mengandalkan rasionalitas dan data yang terverifikasi, pemuda secara efektif meniadakan

efektivitas senjata utama buzzer, yaitu hoaks dan fitnah. Ketika konten buzzer tidak lagi dipercayai atau dibagikan, mesin polarisasi yang mereka bangun akan kehilangan daya dorongnya.

Setelah pemuda berhasil membangun pertahanan kognitif terhadap manipulasi informasi, langkah selanjutnya adalah bergerak dari pertahanan pasif menuju aksi proaktif di ruang digital. Strategi kedua ini berfokus pada Inisiasi Dialog Lintas Identitas dengan menciptakan ruang ketiga (Ruang Netral) di media sosial. Langkah ini secara langsung menjadi perlawanan berbasis nalar terhadap mekanisme pengasingan wacana yang dibangun oleh buzzer.

Di media sosial, buzzer bekerja dengan mempolarisasi komentar, menenggelamkan pemikiran rasional, dan memastikan bahwa perbedaan pandangan hanya berakhir dengan perdebatan emosional. Tugas pemuda adalah membalikkan keadaan ini dengan cara menciptakan ruang netral. Pemuda harus mengambil peran sebagai fasilitator digital yang secara sengaja mendesain forum atau konten di platform (seperti thread diskusi di X, sesi live di Instagram, TikTok, atau podcast) yang mempertemukan individu dari identitas atau kubu pandangan yang berbeda dalam satu meja diskusi virtual. Di sinilah pemuda harus hadir. Bukan untuk berdebat, tapi untuk menyambung dialog. Ruang Netral yang diciptakan oleh pemuda memiliki beberapa prinsip: (1) Kewajiban Data: Setiap argumen harus didasarkan pada data atau fakta yang telah diverifikasi (sejalan dengan Strategi 1 yaitu Literasi Kritis Digital), (2) Regulasi Emosi: Memastikan diskusi berfokus pada isu dan bukan pada serangan personal (*ad hominem*), dan (3) Menemukan Pemahaman Bersama: Memandu diskusi untuk menemukan kesamaan (prinsip berbangsa, kepentingan umum, dll.) alih-alih terus memperdebatkan perbedaan.

Untuk memastikan dialog digital tidak menjadi gelembung virtual, strategi perlawanan pemuda harus diperkuat dengan aksi lintas identitas offline (dunia nyata). Upaya tersebut berfokus pada pembangunan empati sebagai penangkal paling efektif terhadap polarisasi sentimental. Buzzer hanya mampu memanipulasi pihak yang tidak pernah bertemu dan berinteraksi secara langsung, sebaliknya perjumpaan fisik mampu mengikis prasangka. Pemuda dapat

menginisiasi proyek-proyek bersama yang berbasis identitas bersama (seperti proyek sosial, kegiatan antar-sekolah, atau program *community development* lintas-identitas. Kegiatan ini membuat individu untuk bekerja sama menuju tujuan bersama, sehingga perbedaan identitas menjadi tidak relevan, bahkan menjadi sumber kekuatan. Melalui kegiatan offline, pemuda tidak hanya berdialog, tetapi juga berbagi pengalaman dan merasakan emosi yang sama, menghasilkan ikatan sosial yang otentik.

Pembangunan empati ini adalah kunci bagi Persatuan pada masa kini. Persatuan yang dirajut pemuda bukan lagi sekadar toleransi pasif, melainkan pengakuan aktif terhadap perbedaan sebagai bagian inheren dari bangsa. Dengan tiga strategi (Literasi Kritis, Ruang Netral, dan Aksi Offline), pemuda mengubah dinamika perpecahan menjadi narasi yang merangkul semuanya. Mereka menjadi lawan nyata terhadap buzzer, karena mereka tidak hanya melawan narasi kebencian, tetapi juga aktif menciptakan struktur sosial baru yang lebih kokoh.

Kesimpulannya adalah fenomena buzzer politik di ruang digital merupakan ancaman terstruktur terhadap persatuan. Menghadapi kondisi ini, pemuda Indonesia sebagai pewaris Sumpah Pemuda harus tampil sebagai lawan positif buzzer yang bijak. Dialog lintas Identitas adalah strategi paling fungsional dan proaktif. Strategi ini diwujudkan melalui tiga pilar (1) Literasi Kritis (pertahanan kognitif terhadap hoaks), (2) Inisiasi Dialog Digital (menciptakan ruang netral), dan (3) Aksi Offline (membangun empati murni). Upaya bersama ini membuktikan bahwa persatuan bangsa di era digital harus diperjuangkan secara proaktif di atas dasar rasionalitas dan ikatan kemanusiaan yang kuat agar terciptanya persatuan Indonesia.

Saran bagi pemuda adalah agar inisiatif dialog lintas identitas tidak hanya bersifat sementara. Upaya ini dapat dilakukan dalam kegiatan edukatif di sekolah maupun organisasi kepemudaan. Selain itu, kolaborasi dengan platform media sosial perlu diperkuat untuk menciptakan sistem yang lebih mendorong konten bersifat dialog, edukatif, dan membangun nilai persatuan Indonesia. Dengan langkah ini, pemuda Indonesia dapat menjaga semangat Sumpah Pemuda agar tetap hidup, baik di ruang digital maupun di kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

Bradshaw, S., & Howard, P. N. (2019). The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation. Diakses pada 10 Oktober 2025, pukul 22:58.

Felicia, F., & Loisa, R. (2019). Peran Buzzer Politik dalam Aktivitas Kampanye di Media Sosial Twitter. *Koneksi*, 2(2), 352. <https://doi.org/10.24912/kn.v2i2.3906>. Diakses pada 9 Oktober 2025, pukul 20:32.

Mustika, R. (2019). PERGESERAN PERAN BUZZER KE DUNIA POLITIK DI MEDIA SOSIAL. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 2(2), 144–151. <https://doi.org/10.17933/diakom.v2i2.60>. Diakses pada 10 Oktober 2025, pukul 22:35.

Rudi Trianto. (2023). Buzzer sebagai Komunikator Politik. *An-Nida': Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 11(2), 74–97. <https://doi.org/10.61088/annida.v11i2.562>. Diakses pada 8 Oktober 2025, pukul 20:52.

Saraswati, M. S. (2018). Social Media and the Political Campaign Industry in Indonesia. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 3(1), 51–65. <https://doi.org/10.25008/jkiski.v3i1.124>. Diakses pada 10 Oktober 2025, pukul 22:46.

Siregar, A. K., & Qurniawati, E. F. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Buzzer di tempo.co. *Journal of New Media and Communication*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.55985/jnmc.v1i1.1>. Diakses pada 10 Oktober 2025, pukul 22:23.

Sugiono, S. (2020). Fenomena Industri Buzzer Di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 47–66. <https://doi.org/10.15575/cjik.v4i1.7250>. Diakses pada 8 Oktober 2025, pukul 20:54.